

TESIS

**PENGAJUAN CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL
PRESIDEN JALUR NON PARTAI POLITIK
SEBAGAI PENGUATAN DEMOKRASI**



Oleh

AA LaNyalla Mahmud Mattalitti

NIM 092024453008

**PROGRAM STUDI MAGISTER
SAINS HUKUM DAN PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

TESIS

**Pengajuan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Jalur
Non Partai Politik sebagai Penguatan Demokrasi**

Oleh

AA LaNyalla Mahmud Mattalitti

NIM 092024453008

**PROGRAM STUDI MAGISTER
SAINS HUKUM DAN PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCA SARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

TESIS
Pengajuan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden
Jalur Non Partai Politik sebagai Penguatan Demokrasi

Untuk memenuhi syarat memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Sains Hukum dan Pembangunan
Pada Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga

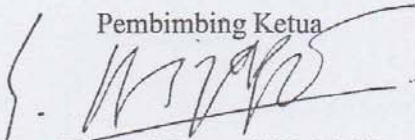
Oleh ;
AA LaNyalla Mahmud Mattalitti
NIM 092024453008

PROGRAM STUDI MAGISTER
SAINS HUKUM DAN PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022

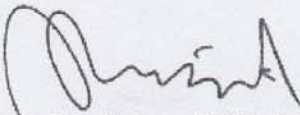
Lembar Pengesahan

TESIS INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL JULI 2022

Oleh:

Pembimbing Ketua

Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M. Hum

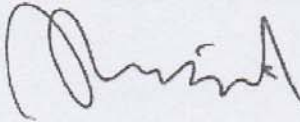
Pembimbing Kedua


Dr. Radian Salman, S.H., LL.M

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Program Magister

Sains Hukum dan Pembangunan


Dr. Radian Salman, S.H., LL.M

Tesis ini telah diuji dan dinilai
pada oleh Panitia Penguji pada Sekolah Pascasarjana Universitas
Airlanggapada Tanggal : 22 Juli 2022

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Dr. Sukardi, S.H., M.H.,

Anggota : Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M. Hum

Dr. Radian Salman, S.H, LL.M

Dr. Rosa Ristawati, S.H., LL.M

Dr. Muhamad Nafik Hadi Ryandono, S.E., M.Si.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AA LaNyalla Mahmud Mattalitti

NIM : 092024453008

Program Studi : Magister Sains Hukum dan Pembangunan

Judul Tesis : Pengajuan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Jalur Non
Partai Politik sebagai Penguatan Demokrasi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis saya ini adalah asli (hasil karya sendiri) bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari karya orang lain. Tesis ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik.

Dalam Tesis ini tidak terdapat pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Demikian, pernyataan ini dibuat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 22 Juli 2022



AA LaNyalla Mahmud
Mattalitti

NIM. 092024453008

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Kehadirat Allah SWT atas karunia yang telah dilimpahkan sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian dan menyelesaikan tesis dengan judul Pengajuan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Jalur Non Partai Politik sebagai Penguatan Demokrasi. Pada kesempatan ini saya sebagai mahasiswa menyampaikan terima kasih kepada :

1. Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Prof. Badri Munir Sukoco, SE. MBA. dan Koordinator Program Studi Program Magister Sains Hukum dan Pembangunan yaitu Dr. Radian Salman, S.H., LL.M atas kesempatan mengikuti pendidikan di Program Studi Magister Sains Hukum dan Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga.
2. Dr. H. Suparto Wijoyo, S.H., M. Hum selaku Pembimbing Ketua dan Dr. Radian Salman, S.H., LL.M selaku Pembimbing, atas arahan, diskusi dan bimbingan yang telah diberikan dalam penulisan tesis ini.
3. Para penguji Proposal dan Tesis, yakni Dr. Sukardi, Dr. Rosa Ristawati, Dr. Nafik Hadi R yang telah memberikan catatan kritis terhadap isi dari tesis ini.
4. Seluruh Staf pengajar pengajar Magister Sains Hukum dan Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga atas wawasan kelimuan selama mengikuti pendidikan Magister.
5. Para tenaga kependidikan yang telah melayani dan memfasilitasi proses administrasi pendidikan sehingga dapat berjalan dengan baik.
6. Kepada keluarga saya seluruhnya, istri dan anak-anak yang telah memberikan motivasi serta seluruh rekan, khususnya pada kelas kemitraan Kadin yang juga memberikan support dalam studi.

Surabaya, 22 Juli 2022

Penulis

SUMMARY

The idea of an individual presidential candidate becomes an attractive offer for reformulation of filling the positions of president and vice president in elections in Indonesia. In the constitutional review, there are attempts to re-interpret several articles in the 1945 Constitution on the political rights of citizens related to filling the positions of president and vice president. The 1945 Constitution in Article 6A paragraph (2) stipulates that the presidential and vice presidential candidate pairs are proposed by a political party or coalition of political parties participating in the general election prior to the implementation of the general election. The idea of individual presidential and vice-presidential candidates is due to a tendency to strengthen people's distrust of the role and functionalization of political parties at this time. The people feel apathetic about the role of the party which only thinks about power without fighting for the interests of the people as the party it represents. The DPR as a form of representation of political parties has not succeeded in convincing the people, in fact it tends to strengthen the symptom of delegitimization of the people's representatives. The failure of political parties to prepare human resources, including the regeneration process of national leadership, is due, among others, to the absence of party transparency processes and even tends to give birth to dynastic politics, resulting in limited people choosing the best candidate for leaders from reliable and professional cadres. The quality of national leadership has yet to be measured because there are many leaders who tend to be pragmatic and have a transactional mentality, who treat the people as objects that can be traded. Therefore, it is natural that the people hope that the ideas of individual presidential and vice-presidential candidates will be accommodated according to the people's choice in the upcoming general election. Several efforts have been made to accommodate individual/independent presidential and vice presidential candidates in the upcoming elections, among others, by conducting a judicial review of Law no. 42 of 2008 concerning the Presidential and Vice-Presidential Election against the 1945 Constitution. The argument for the interpretation of the constitution put forward is based on the hermeneutic method using a pattern of interpretation of the conceptualization of human rights values, with the meaning of the constitutional right of every citizen to protect freedom through the nomination of an individual/independent president. The decision of the Constitutional Court in this case states that the nomination of presidential and vice-presidential candidates is the

constitutional right of political parties. The Constitutional Court's decision indicates the use of a pattern of constitutional interpretation called Originalism (original intense). The Constitutional Court's decision to reject all requests for judicial review of Law no. 42 of 2008 was the entry point for an effort to amend the 1945 Constitution for the fifth time, one of which was about individual presidential candidates as drafted by the DPD. Therefore it takes the right time to do it. The condition of political parties in Indonesia has only been seriously developed since the mid-1998-1999 so that the tradition of party-based democracy needs to be seriously considered. If party-based democracy is getting better, then the idea of an individual presidential candidate is not a threat from political parties so that it is easily accepted. However, the political accumulation of the masses cannot be so easily predicted, especially when there are decisions regarding candidates for Governor and Regent/Mayor from individual candidates. If later the national leadership is deemed to have failed to prepare, the possibility is that the MPR must be able to read the situation to be able to make changes to the 1945 Constitution for the fifth time.

RINGKASAN

Gagasan calon presiden perseorangan menjadi sebuah tawaran yang menarik bagi reformulasi pengisian jabatan presiden dan wakil presiden dalam pemilu di Indonesia. Dalam kajian konstitusi ada upaya untuk melakukan tafsir ulang beberapa pasal dalam UUD 1945 atas hak-hak politik warga Negara terkait dengan pengisian jabatan presiden dan wakil presiden. UUD 1945 dalam Pasal 6A ayat (2) , merumuskan bahwa Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Ide calon Presiden dan wakil Presiden perseorangan disebabkan ada kecenderungan menguatnya gejala ketidakpercayaan rakyat atas peran dan fungsionalisasi partai politik saat ini. Rakyat merasa apatis terhadap kiprah partai yang hanya memikirkan kekuasaan belaka tanpa memperjuangkan kepentingan rakyat sebagai pihak yang diwakilinya. DPR sebagai bentuk representasi parpol ternyata belum berhasil meyakinkan rakyat, bahkan cenderung semakin menguatnya gejala deligitimasi timbul wakil rakyat. Gagalnya partai politik mempersiapkan sumber daya insani termasuk proses regenerasi kepemimpinan nasional, disebabkan antara lain tidak adanya proses transparansi partai bahkan cenderung melahirkan politik dinasti, mengakibatkan rakyat terbatas memilih calon pemimpin terbaik dari kader-kader yang handal dan profesional. Kualitas kepemimpinan nasional belum nampak terukur karena banyaknya pemimpin yang cenderung pragmatis dan bermental transaksional, yang memperlakukan rakyat sebagai obyek yang dapat diperjualbelikan. Oleh karena itu kiranya wajar apabila rakyat berharap terakomodasinya gagasan calon presiden dan wakil presiden perseorangan sesuai pilihan rakyat dalam pemilihan umum yang akan datang. Beberapa upaya yang dilakukan dalam rangka terakomodasikannya calon presiden dan wakil presiden perseorangan/independen dalam pemilu yang akan datang antara lain dengan dilakukannya uji materi UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945. Argumentasi atas tafsir konstitusi yang dikemukakan didasarkan pada metode hermeneutic dengan menggunakan pola penafsiran konseptualisasi nilai-nilai HAM, dengan makna adanya hak konstitusional setiap warga negara dalam melindungi kebebasan melalui pencalonan presiden perseorangan/independen. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini menyatakan bahwa pengusulan capres dan cawapres merupakan hak konstitusional partai politik. Putusan Mahkamah konstitusi tersebut mengindikasikan digunakannya pola

penafsiran konstitusi yang disebut Orisinalisme (original intens) . Penafsiran tersebut sebagai penafsiran yang tidak demokratis dan karenanya dapat berimplikasi terbentuknya sistem yang otoriter, karena adanya watak determinisme tekstual yang menghasilkan absolute makna, yakni memutlakkan kesesuaian dengan makna yang dimaksudkan para perumus UUD. Putusan MK yang menolak seluruh permohonan uji materi terhadap UU No. 42 Tahun 2008 menjadi pintu masuk adanya upaya melakukan amandemen untuk kelima kalinya terhadap UUD 1945, yang salah satu materinya mengenai calon presiden perseorangan sebagaimana yang telah dirancang oleh DPD. Oleh karena itu dibutuhkan waktu yang tepat untuk melakukannya. Kondisi partai politik di Indonesia masih baru dibangun secara serius sejak pertengahan tahun 1998-1999 sehingga tradisi demokrasi berbasis partai perlu dipikirkan secara serius. Apabila demokrasi berbasis partai sudah semakin baik, maka ide calon presiden perseorangan bukan merupakan ancaman dari partai politik sehingga hal tersebut mudah diterima. Meski demikian akumulasi politik masa tidak dapat begitu mudah diprediksi terutama sudah adanya putusan mengenai calon Gubernur dan Bupati/Walikota dari calon perseorangan. Apabila nanti kepemimpinan nasional dianggap gagal dipersiapkan, kemungkinan yang terjadi adalah MPR harus dapat membaca situasi untuk dapat melakukan perubahan UUD 1945 yang kelima kalinya.

ABSTRAK

Menurut UUD 1945, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Hal ini mengakibatkan tertutupnya calon Presiden dan Wakil Presiden perseorangan atau sering disebut independent. Secara politik dalam beberapa kali pemilihan umum, ide calon Presiden dan wakil Presiden perseorangan selalu muncul meskipun hal ini telah tertutup setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa calon perseorangan masih sangat relevan karena menguatnya gejala ketidakpercayaan rakyat atas peran dan fungsionalisasi partai politik. Kegagalan partai politik mempersiapkan sumber daya manusia dan regenerasi kepemimpinan nasional, disebabkan tidak adanya proses transparansi partai bahkan cenderung melahirkan politik dinasti, mengakibatkan rakyat terbatas memilih calon pemimpin terbaik dari kader-kader yang handal dan profesional. Selanjutnya temuan penelitian ini, dengan pendekatan putusan, Mahkamah konstitusi menggunakan penafsiran original intent yang tidak demokratis dan karenanya dapat berimplikasi terbentuknya sistem yang otoriter, karena adanya watak determinisme tekstual yang menghasilkan absolute makna. Pada sisi lain calon perseorangan seharusnya dipandang hermeneutic dengan menggunakan pola penafsiran konseptualisasi nilai-nilai HAM. Dalam hubungan dengan keparataian, tesis ini menemukan bahwa apabila demokrasi berbasis partai sudah semakin baik, maka ide calon presiden perseorangan bukan merupakan ancaman dari partai politik sehingga hal tersebut mudah diterima.

Kata Kunci : pemilihan umum, mahkamah konstitusi, calon presiden perseorangan

ABSTRACT

THE SUBMISSION CANDIDATES FOR PRESIDENT AND VICE PRESIDENT
FROM NON POLITICAL

AS A STRENGTHENING OF DEMOCRACY

According to the 1945 Constitution of Indonesia, Candidates for President and Vice President are proposed by political parties or coalitions of political parties participating in the general election prior to the implementation of the general election. This resulted in the closure of individual candidates for President and Vice President or often called independent candidate. Politically, in several general elections, the idea of individual presidential and vice-presidential candidates has always emerged even though this has been closed after the decision of the Constitutional Court. This study identifies that individual candidates are still very relevant because of the strengthening of the symptoms of people's distrust of the role and functionalization of political parties. The failure of political parties to prepare human resources and regenerate national leadership, due to the absence of party transparency processes, even tends to give birth to dynastic politics, resulting in limited people choosing the best candidate for leaders from reliable and professional cadres. Furthermore, the findings of this study, with a decision approach, the Constitutional Court uses an original intent interpretation that is not democratic and therefore may have implications for the formation of an authoritarian system, as result of textual determinism that produces absolute meaning. On the other hand, individual candidates should be considered hermeneutic by using a pattern of interpretation of the conceptualization of human rights values. In relation to politics, this thesis found that when party-based democracy is getting better, the idea of an individual presidential candidate is not a threat from political parties, so it is easily accepted.

Key Words : general election, constitutional court, individual presidential candidate.

DAFTAR ISI

Sampul Luar.....	i
Sampul Dalam.....	ii
Lembar Prasyarat Gelar	iii
Lembar Pengesahan	iv
Penetapan Panitia Penguji Tesis	v
Lembar Orisinalitas.....	vi
Ucapan Terima Kasih	vii
Summary.....	viii
Ringkasan.....	x
Abstrak.....	xii
Abstract.....	xiii
Daftar Isi	xiv
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah	1
1.1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.2 Tujuan Penelitian.....	5
1.3 Manfaat Penelitian.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Jenis Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Waktu Pengumpulan data.....	7
1.4.3 Metode Pengumpulan Data.....	7

BAB II.....	9
2.1 Regenerasi Kepemimpinan Nasional yang Lamban	9
2.2 Perdebatan dalam Penafsiran /Interpretasi UUD 1945 tentang Calon Presiden dan Wakil Presiden Perseorangan.....	14
2.3 Putusan MK Nomor 52/PUU-XX/2022. Yaitu putusan terkait judicial review atas Pasal 222 UU Pemilu yang diajukan DPD RI dan Partai Bulan Bintang (PBB).	25
BAB III	27
3.1 Upaya Melakukan Perubahan UUD 1945	27
3.2 Konvensi Ketatanegaraan dan Konvensi Partai Politik.....	28
3.3 Menakar Peluang Calon Presiden dan Wakil Presiden Perseorangan dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.....	33
3.4 Konstitusionalitas Presidensial Threshold (PT).	36
3.4.1 Konsistensi Sistem Pemerintahan Presidensial (Aspek teoritis)	36
3.4.1 <i>Presidensial Threshold</i> dalam UU Pemilu tidak sejalan dengan rumusan UUD 1945 (Aspek Yuridis).	39
BAB IV	42
4.1 Kesimpulan.....	42
4.2 Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA	46